



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kerugian Negara Capai RP 300 Juta

Dana Desa Geramat

BINTUHAN, BE - Mantan Kepala Desa (Kades) Geramat Kecamatan Kinal berinisial ED bersama Tim Pengelola Kegiatan (TPK) serta bendahara desa diawal taun 2020 ini akan panas dingin. Sebab tim Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) telah menemukan indikasi kerugian negara (KR) dalam program Dana Desa (DD) Desa Geramat Kecamatan Kinal 2018. Senin

(30/12) hari ini APIP akan menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Kepala Inspektorat Daerah (Irda) Kaur.

Rampungnya LHP itu dibenarkan Kepala Inspektorat Daerah (Irda) Kaur, Three Marnofe MTPd. Menurutnya dijadwalkan hari ini dirinya akan membubuhkan tanda tangan dalam LHP terkait dengan audit fisik DD Geramat. Sehingga besaran kerugian negara itu belum bisa dipastikan secara rinci.

Tim sendiri sudah melakukan pengukuran dan pemeriksaan fisik.

"LHPnya belum saya tanda tangani dijadwalkan Senin besok (hari ini), namun jumlahnya lebih kurang Rp 300 jutaan," imbuhnya.

Sebelumnya tim APIP sudah melakukan pengecekan pada barang dan jasa dikegiatan fisik DD desa itu yang nilainya kisaran Rp 400 jutaan ditemukan kerugian negara yang jumlahnya lumayan besar. "Kon-

sekwensinya setelah kita tanda tangani, diberikan waktu 60 hari untuk pengembalian dan kalau tak dikembalikan, kita akan limpahkan ke penyidik," ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Kaur AKBP Arief Hidayat SIK, melalui Kasat Reskrim Iptu Ahmad Khairuman SE belum lama ini menegaskan, pihaknya bersama tim APIP menemukan dalam DD tahun 2018 yang dikerjakan oleh TPK di bawah komando mantan Kades beri-

sial ED. Diketahui Penyidik Polres Kaur mendapat laporan adanya indikasi korupsi dalam pembangunan DD tahun 2018 yang dilakukan oleh TPK Desa Geramat Kecamatan Kinal.

"Untuk nilai kerugiannya masalah DD Geramat ini kita menunggu LHP diterbitkan oleh inspektorat, nanti ada waktu 60 hari untuk mengembalikannya, nah jika tidak dikembalikan, maka akan kita proses sesuai hukum yang berlaku," tegasnya. (618)